

D 11/4-25

PERAN BADAN PENGELOLA SITUS KOTA LAMA SEMARANG DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KOTA LAMA SEMARANG

¹⁾Resnauli Simamora, ²⁾Dewi Rostyaningsih, ³⁾Hardi Warsono

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269 Telepon (024)
7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman : www.fisip.undip.ac.id Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Inadequate public facilities, no land price regulations, inappropriate relocation of street vendors, and inadequate spatial planning for people with disabilities are the problems of the government's role in developing tourist attractions in Semarang's Old City. The role of the government, namely the Semarang Old City Site Management Agency in developing tourist attractions is very important. This study aims to analyze the role and factors that support and hinder the Semarang Old City Site Management Agency in carrying out its role in developing tourist attractions in Semarang's Old City. The research method used is qualitative descriptive with data collection techniques through observation, interviews, documentation, and literature studies. The role theory used is Blakely's theory which includes the role as a coordinator, facilitator, stimulator, and motivator. The results of the study are that the role as a coordinator runs well through the implementation of management and involvement in making regulations. As a facilitator it is not good because there is no program for the community; as a stimulator it is not good because there is no cooperation with the community or business world and there is no realization of a 50% PBB discount; and as a motivator it is not good because there is no website for tourism promotion and the selection of people for socialization is not right. There are supporting factors, namely policies with implementation according to regulations and trust with public trust in the government. Inhibiting factors are communication due to lack of communication to the community and values, namely no transparency and no responsibility for the 50% PBB discount policy. The suggestion is to create a website, create and manage forums, and cooperate with the community.

Keywords: Role, Government, Tourism Object Development

ABSTRAK

Penyediaan fasilitas belum memadai untuk publik, belum ada regulasi harga lahan, relokasi pedagang kaki lima tidak tepat sasaran, dan penataan tata ruang untuk penyandang difabel belum mencukupi adalah permasalahan peran pemerintah dalam mengembangkan objek wisata di Kota Lama Semarang. Peran pemerintah yaitu Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang dalam pengembangan objek wisata sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan faktor yang mendukung dan menghambat Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang dalam melakukan perannya untuk pengembangan objek wisata di Kota Lama Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teori peran yang digunakan adalah teori dari Blakely yang meliputi peran sebagai koordinator, fasilitator, stimulator, dan motivator. Hasil penelitian yaitu peran sebagai koordinator berjalan dengan baik melalui pelaksanaan manajemen dan keterlibatan dalam pembuatan peraturan. Sebagai fasilitator kurang baik karena belum ada program untuk masyarakat; sebagai stimulator kurang baik karena tidak ada kerja sama dengan masyarakat atau dunia usaha dan tidak ada realisasi diskon PBB 50%; dan sebagai motivator kurang baik karena belum ada *website* untuk promosi wisata dan pemilihan masyarakat untuk sosialisasi kurang tepat. Terdapat faktor pendukung yaitu kebijakan dengan pelaksanaan sesuai peraturan dan kepercayaan dengan adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Faktor penghambat adalah komunikasi karena kurangnya komunikasi untuk masyarakat dan nilai yaitu tidak ada transparansi dan tidak bertanggungjawab atas kebijakan diskon PBB 50%. Sarannya adalah membuat laman *website*, pembuatan dan pengelolaan forum, dan kerja sama dengan masyarakat.

Kata kunci: Peran, Pemerintah, Pengembangan Objek Wisata

Pendahuluan

Sektor pariwisata adalah sektor yang berpotensi tinggi apabila dikembangkan karena dapat berdampak positif dalam menumbuhkan perekonomian negara atau daerah. Dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataannya tepatnya pasal 1 ayat (3) dicantumkan mengenai pariwisata merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh bermacam-macam fasilitas dan juga adanya layanan yang dipersiapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, dunia usaha dan juga masyarakat. Dalam pasal 6 menjelaskan mengenai pembangunan kepariwisataan dilaksanakan melalui implementasi rencana membangun pariwisata dengan adanya perhatian akan budaya dan alam yang khas, keberagaman, keunikan dan apa yang dibutuhkan masyarakat ketika melakukan wisata.

Kota Semarang adalah suatu kota di Indonesia, tepatnya di Jawa Tengah yang mempunyai kawasan sejarah potensial disebut Kota Lama Semarang. Kawasan tersebut diberi julukan sebagai "*Little Netherland*" sebab berdasarkan historisnya kota tersebut adalah pusat kota klasik yang dijadikan sebagai tempat untuk mendirikan bangunan dengan gaya Eropa oleh Belanda (Pratiwo, 2004). Tahun 2015 Kota Lama Semarang masuk dalam "*tentative list*" UNESCO sebagai nominasi daerah yang memiliki peluang

menjadi Warisan Dunia Tahun 2020 dengan tujuan wisata tingkat internasional. Bangunan bersejarah yang hingga ini ada di Kota Lama diantaranya adalah Gereja GPIB Immanuel, Stasiun Tawang, Jembatan Berok, Gedung Marabunta, bangunan Pabrik Rokok "Praoe Layar" dan sebagainya.

Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata di Kota Semarang dilakukan sesuai Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataannya. Peraturan tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki hak dalam mengatur dan mengelola urusan pariwisata sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah Kota Semarang membentuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan khusus untuk Kota Lama Semarang, pengelolaannya dilakukan oleh Badan Pengelola Situs Kota Lama (BPSKL) Semarang.

Badan Pengelola Situs Kota Lama (BPSKL) berperan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Kota Lama Semarang. Salah satu bentuk pembangunan yang dilakukan adalah program revitalisasi Kota Lama. Namun, penyediaan sarana dan prasarana dalam program tersebut tidak diimplementasikan dengan baik terlihat dari kurangnya

fasilitas publik, seperti toilet, tempat pembuangan sampah, bangku duduk, serta penerangan yang tidak memadai. Kondisi ini menyebabkan wisatawan merasa kurang nyaman saat berkunjung.

Program revitalisasi Kota Lama Semarang oleh Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang juga dilakukan dengan pengadaan relokasi pedagang kaki lima. Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang melakukan program revitalisasi dengan merelokasi pedagang kaki lima ke dalam bangunan bersejarah untuk mengatasi pedagang kaki lima berjualan dengan memanfaatkan fasilitas umum dan menyebabkan kemacetan. Faktanya, realisasi program revitalisasi ini tidak berjalan efektif. Banyak pedagang kaki lima merasa kurang puas dengan fasilitas yang disediakan pemerintah. Relokasi yang dilakukan dinilai tidak tepat sasaran karena lokasi baru jauh dari pusat keramaian dan lahan seluas 2 meter yang diberikan tidak cukup untuk menampung seluruh barang dagangan mereka.

Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang memiliki fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan program kerja manajemen pengelolaan. Salah satu programnya adalah penataan lahan yaitu jalur jalan dibentuk untuk menjadi jalur pejalan kaki. Penataan lahan ini berdampak pada adanya larangan

kendaraan bermotor melintas di jalur pejalan kaki tersebut untuk memberikan keleluasaan pejalan kaki. Faktanya, lahan parkir yang disediakan di kawasan tersebut kurang mencukupi, kurang ditata dan kurang dikelola oleh Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang sehingga muncul parkir liar yang mengganggu kegiatan wisata dan pergerakan di tempat tersebut.

Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang juga menunjukkan perannya dalam hal menyediakan fasilitas untuk masyarakat penyandang disabilitas (difabel). Peran ini penting dilaksanakan sebagai langkah untuk menciptakan ruang yang adil bagi publik dan sejumlah pedestrian telah menyediakan jalan bagi tuna netra. Faktanya, kondisi penataan kawasan tersebut dan aksesibilitasnya kurang mencukupi bagi warga difabel. Kelompok penggiat difabel di kawasan tersebut menemukan fakta bahwa sejumlah fasilitas belum dapat dimanfaatkan oleh warga yang memiliki cacat. Selain itu, tidak ada informasi berbentuk visual untuk tuna rungu maupun tuna netra karena hal tersebut membuat mereka tidak mengerti dan tidak mengetahui informasi Kota Lama.

Permasalahan peran Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang lainnya adalah tidak menyediakan

informasi berbentuk visual di gedung-gedung bersejarah di Kota Lama. Buktinya adalah wisawatan yang mengalami kesulitan memperoleh informasi yang jelas dan pada akhirnya nilai sejarah dari situs tersebut tidak tersampaikan dengan baik kepada wisatawan. Dalam Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama pasal 6 ayat 2 dijelaskan bahwa tugas dari pemerintah daerah adalah penyediaan informasi Situs Kota Lama kepada masyarakat. Artinya, Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang dalam mengembangkan objek wisata Kota Lama yang merupakan cagar budaya tidak direalisasikan sesuai isi dari peraturan pemerintah.

Menurut Blakely (1989), pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata berperan sebagai fasilitator yaitu pemerintah memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam mengembangkan wisata agar berlangsung dengan lancar. Dalam Perda Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2020 pasal 11 ayat (5) dijelaskan bahwa salah satu strategi dalam merealisasikan kebijakan pemanfaatan di Situs Kota Lama yaitu penyediaan tempat untuk kegiatan sosial, perekonomian dan juga kebudayaan. Faktanya becak sebagai transportasi yang sering dijumpai di kota tersebut dilarang mangkal karena dinilai

sebagai sumber kemacetan. Hal tersebut terjadi juga karena jalan di kawasan tersebut semakin sempit akibat adanya pembatas jalan dan lampu jalan yang dipasang di lokasi tersebut yang merupakan jatah atas kegiatan revitalisasi dan orang-orang yang bekerja sebagai tukang becak sering disidak oleh Satpol PP akibat mereka mangkal di kawasan tersebut.

Pemerintah merencanakan bahwa becak akan dimanfaatkan dan merupakan pilihan wisatawan untuk mengelilingi Kota Lama sehingga memberikan perjalanan wisata baru bagi wisatawan. Harapan pemerintah terhadap becak wisata tersebut adalah menjadi *local guide* supaya mempermudah pemberian penjelasan mengenai informasi Kota Lama dengan memberikan buku panduan wisata dan menjadi pemandu wisata yang mampu dan berdampak dalam pengembangan wisata di Kota Lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat belum diberdayakan oleh Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang di Kota Lama Semarang.

Masalah peran lainnya adalah tidak adanya regulasi yang mengatur harga lahan di Kota Lama yang berdampak pada kawasan tersebut mempunyai memiliki harga lahan yang beragam dan juga nilainya dominan tinggi. Sebelum dan sesudah adanya revitalisasi sekitar 87,5%

harga lahan per bangunan dominan konstan. Presentase harga yang mengalami kenaikan ataupun penurunan setelah revitalisasi kawasan kira-kira 12,5%. Contohnya, Kantor Jiwasraya terjadi peningkatan 100% dari harga sebelumnya dan Hero Coffee Indonesia mengalami penurunan harga dari sebelumnya. Harga lahan ini berpengaruh terhadap pemanfaatan lahan di atasnya dan berdampak pada adanya gedung-gedung bersejarah yang tidak dimanfaatkan dengan maksimal sebagai wisata budaya.

Salah satu peran pemerintah daerah dalam pengembangan objek wisata adalah sebagai motivator (Blakely, 1998). Peran ini diwujudkan melalui promosi, baik promosi produk masyarakat maupun objek wisata di Kota Lama. Salah satu contohnya adalah pendirian Galeri Industri Kreatif di Kota Lama Semarang. Galeri ini menjadi wadah bagi pelaku Industri Kreatif Mandiri (IKM) di Jawa Tengah untuk memamerkan karya mereka yang inovatif, berkualitas unggul, dan memiliki desain yang beragam. Namun, perusahaan-perusahaan di bidang ekonomi kreatif yang masuk ke kawasan Kota Lama Semarang masih minim. Buktinya adalah keberadaan subsektor industri kreatif di Galeri Industri Kreatif hanya terdapat 16 sektor yang menunjukkan bahwa keseluruhan subsektor industri kreatif belum terdapat di

Galeri tersebut. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingkat kunjungan wisatawan yang rendah, fasilitas galeri yang belum lengkap, promosi yang masih kurang aktif dilakukan dan spot foto yang tersedia kurang menarik.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena menggunakan teori Bakely (1989: 78-81) dalam Mudrajad Kuncoro (200:113-114) yang mencakup empat peran pemerintah dalam pengembangan objek wisata, yaitu koordinator, fasilitator, stimulator, dan motivator. Fokus penelitian ini adalah pada peran Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang (BPSKL) dalam pengembangan objek wisata di Kota Lama Semarang, yang merupakan lokasi wisata budaya di Provinsi Jawa Tengah.

BPSKL Semarang berperan penting dalam kegiatan pariwisata di Kota Lama Semarang sesuai dengan yang dicantumkan dalam peraturan yang berlaku dan melibatkan banyak pihak baik, masyarakat, dunia bisnis, pemerintah setingkat ataupun pemerintah di atasnya. Meskipun demikian, peran BPSKL tersebut tidak sepenuhnya dilakukan alasannya dapat diperhatikan melalui fakta-fakta yang ada di Kota Lama Semarang. Berdasarkan permasalahan atas kenyataan yang terjadi di kawasan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul “Peran Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang dalam Pengembangan Objek Wisata di Kota Lama Semarang”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif karena peneliti ingin melakukan analisis dan deskripsi terhadap permasalahan peran Badan Pengelola Situs Kota Lama (BPSKL) Semarang dalam pengembangan objek wisata di Kota Lama Semarang. Situs penelitian yang dipilih adalah Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang, yang merupakan lembaga pemerintah yang relevan dengan topik penelitian. Subjek penelitian terdiri dari Sekretaris BPSKL, Unit Umum BPSKL, Unit Perencana BPSKL, anggota BPSKL, serta masyarakat di Kota Lama Semarang yang berperan dalam pengembangan objek wisata budaya di kawasan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang berisi informasi berupa kata atau kalimat dari narasumber.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis dan interpretasi data dilakukan dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian

data, dan penarikan kesimpulan. Kualitas data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa data dari berbagai sumber, seperti wawancara, jurnal, dan dokumen.

Hasil dan Pembahasan

Peneliti mengumpulkan hasil dari wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan beberapa informan. Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak terkait dan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi tentang peran Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang dalam pengembangan objek wisata di Kota Lama Semarang.

Peran Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang dalam Pengembangan Objek Wisata di Kota Lama Semarang

a. Peran Sebagai Koordinator

Menurut Blakely, peran sebagai koordinator adalah peran pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Peran sebagai koordinator sangat penting karena peran tersebut mengendalikan kegiatan yang dilakukan dan harus berkoordinasi antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini pemerintah dapat merealisasikan perannya melalui adanya tindakannya dengan menetapkan kebijakan dalam bidang

pariwisata dan sebagai perencana dan pelaksana manajerial.

1. Menetapkan kebijakan dalam pariwisata

Menetapkan kebijakan dalam bidang pariwisata adalah pemerintah bertindak dalam menetapkan kebijakan baik tertulis maupun tidak tertulis. Wujud tindakan yang dilakukan adalah dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan peraturan yang berkaitan dengan Kota Lama Semarang yaitu sebagai pemberi gagasan ataupun rekomendasi dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, contohnya adalah ikutserta dalam penyusunan RTBL yang memuat mengenai aturan perencanaan, perubahan maupun pembangunan di Kota Lama.

2. Sebagai pelaksana manajerial

Pengembangan wisata Kota Lama Semarang tidak lepas dari yang namanya manajemen dan BPSKL melakukan beberapa tindakan yang berkaitan dengan manajerial yaitu 1) adanya pengoordinasian melalui adanya koordinasi secara formal dan informal; 2) adanya pengarahan dimana BPSKL mengarahkan pemilik bangunan untuk mengurus surat izin kepada BPSKL dan oleh BPSKL memberikan rekomendasi kepada pemerintah; 3) adanya monitoring dan evaluasi secara berkala untuk

meningkatkan aktivitas wisata secara optimal dan berbasis pada pelestarian; dan 4) adanya pengorganisasian melalui susunan kepengurusan dari BPSKL disertai dengan tugas dan fungsi tiap pengurus.

b. Peran Sebagai Fasilitator

Dalam pengembangan objek wisata terdapat peran pemerintah yaitu dengan adanya tindakan dalam membuat iklim yang kondusif bagi pelaku yang berkepentingan dalam pengembangan objek wisata. Bentuk tindakan untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan dengan adanya penyediaan sarana dan prasarana serta memfasilitasi aktivitas masyarakat.

1. Menyediakan sarana dan prasarana

Menyediakan sarana dan prasarana adalah tindakan yang dilakukan dengan adanya usaha dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung agar program atau kegiatan pengembangan objek wisata berjalan dengan efektif. Usaha yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan dukungan kepada pihak yang berkepentingan dalam pengembangan objek wisata. BPSKL dalam penyediaan sarana dan prasarana bertindak dengan memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk pengembangan objek

wisata Kota Lama dan untuk penyediaan informasi bangunan di Kota Lama BPSKL menyediakan *barcode* untuk diakses melalui *handphone*.

Terdapat beberapa sarana dan prasarana yang tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Contohnya adalah *charger box* yaitu tempat bagi orang-orang yang datang ke Kota Lama untuk mengisi daya baterai *handphone* ataupun laptop. Selain itu, pengadaan *barcode* juga cukup memprihatinkan karena ada beberapa *barcode* yang sudah rusak sehingga tidak dapat diakses untuk memperoleh informasi bangunan lebih lanjut artinya kurangnya tindakan pemeliharaan ataupun perbaikan mengenai prasarana yang ada di Kota Lama Semarang oleh BPSKL.

2. Memfasilitasi aktivitas masyarakat

Memfasilitasi aktivitas masyarakat artinya pemerintah daerah memberikan berbagai arahan kepada masyarakat mengenai pengembangan objek wisata. BPSKL tidak melakukan fasilitasi terhadap aktivitas masyarakat karena tidak adanya anggaran yang diberikan pemerintah untuk dikelola langsung oleh BPSKL Semarang. BPSKL kurang aktif dalam melibatkan pemilik usaha ataupun masyarakat dalam mengembangkan wisata Kota Lama dilihat dari pengusaha yang tidak dilibatkan

dalam kegiatan yang diadakan di Kota Lama.

c. Peran sebagai Stimulator

Menurut Blakely, dalam pengembangan objek wisata dibutuhkan peran pemerintah sebagai stimulasi karena dengan adanya peran ini tercipta hubungan kerjasama dengan berbagai pihak. Peran ini juga untuk menstimulasi terjadinya kegiatan-kegiatan yang berguna untuk meningkatkan jumlah pengunjung di objek wisata tersebut. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukannya dengan menciptakan strategi untuk mengembangkan objek wisata tersebut.

1. Kerjasama dengan berbagai sektor

Kerjasama dengan berbagai sektor yaitu bentuk peran sebagai stimulator dengan menjalin hubungan kerjasama dengan sektor atau pihak yang berkepentingan dalam pengembangan objek wisata. Pelaksanaan kerjasama oleh BPSKL dilakukan tanpa adanya perjanjian kerjasama atau MoU. BPSKL melakukan kerjasama bersama dengan dinas pemerintahan lainnya, contohnya Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan, untuk lingkungan bisnis dan masyarakat BPSKL sendiri belum melakukan kerja sama dengan pengusaha. BPSKL hanya sebatas memberikan saran atau rekomendasi

mengenai jenis usaha yang cocok untuk dijalankan di Kota Lama.

2. Bantuan dana

Bantuan dana adalah wujud peran yang dilakukan dengan adanya pemberian sejumlah uang atau dana kepada pihak lain. BPSKL tidak memiliki anggaran yang secara langsung diberikan oleh pemerintah tetapi BPSKL dapat mengajukan permintaan dana kepada pemerintah untuk kepentingan Kota Lama khususnya untuk bangunan nasional. Untuk bangunan milik pribadi (masyarakat) diberikan diskon PBB 50%, dan masyarakat tidak pernah mendapatkan bantuan diskon PBB 50% atas bangunan milik pribadi.

d. Peran sebagai Motivator

Menurut Blakely, peran sebagai motivator sangat penting karena dengan adanya peran ini maka, kegiatan yang ada di objek wisata tersebut dapat berjalan dengan lancar. Melalui sosialisasi ini pemerintah dapat memberikan informasi atau pemahaman tentang yang dapat dilakukan untuk mengembangkan objek wisata dan juga sebagai jalan untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di tempat wisata. Tindakan dari peran ini dapat dilakukan dengan

melakukan sosialisasi dan melakukan promosi wisata.

1. Melakukan sosialisasi

BPSKL melakukan sosialisasi didasarkan pada kebutuhan dan situasi yang terjadi dengan media yang digunakan adalah media sosial. seperti pelaksanaan event dan pelaksanaan *car free day* dan *car free night*. BPSKL telah melakukan sosialisasi tetapi informasi sosialisasi tersebut tidak sepenuhnya tersampaikan. Hal ini disebabkan oleh pemilihan warga untuk mengikuti sosialisasi dominan kurang tepat dalam menyampaikan informasi dari sosialisasi yang dilakukan.

2. Melakukan promosi wisata

Melakukan promosi wisata artinya pemerintah melakukan upaya untuk memberitahukan atau menyebarluaskan informasi mengenai objek wisata. Pelaksanaan promosi wisata ini ditujukan untuk meningkatkan angka kunjungan wisata dan memperkenalkan objek wisata kepada masyarakat nusantara maupun luar negeri. Pelaksanaan promosi dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan untuk kepemilikan akun sendiri mengenai BPSKL belum ada sehingga dilakukan promosi mandiri melalui *whatsapp* ataupun dengan mencetak pamflet, brosur

dan leaflet dan dan museum Kota Lama dengan penggunaan aplikasi Lunpia.

Faktor yang Mempengaruhi Peran Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang dalam Pengembangan Objek Wisata

a. Faktor pendukung

1. Kebijakan

BPSKL dalam melakukan perannya untuk pengembangan Kota Lama didasarkan pada adanya kebijakan dari pemerintah kota yaitu peraturan walikota dan juga surat keputusan. Faktor kebijakan mendukung peran sebagai koordinator karena dalam mengkoordinasikan kegiatan pariwisata membutuhkan landasan hukum atau kebijakan. Dalam penelitian ini, kebijakan tersebut adalah Perwal Semarang 11 Tahun 2024 dan RTBL dibuat bersama BPSKL.

2. Kepercayaan

Kepercayaan faktor yang berpengaruh pada peran dalam mengembangkan wisata. Dalam pelaksanaan peran untuk pengembangan Kota Lama diperoleh respon positif mengenai kepercayaan terhadap BPSKL. Menurut Blakely, peran sebagai koordinator artinya pemerintah sebagai penyelenggara dalam pengembangan objek wisata. Dalam hal ini berarti peran BPSKL sebagai pemimpin

yang ditunjukkan melalui menetapkan kebijakan dalam pariwisata dan juga sebagai pelaksana manajerial. Hubungan kepercayaan terhadap koordinator bersifat mendukung dapat dilihat dari kepercayaan terhadap pemimpin atau BPSKL.

b. Faktor Penghambat

1. Nilai

Dalam organisasi, interpretasi nilai-nilai ini adalah bagian dari budaya organisasi. Adapun peran yang dipengaruhi oleh nilai tersebut adalah a) peran sebagai stimulator, terdapat kebijakan diskon PBB 50% tetapi faktanya masyarakat ataupun pemilik bangunan tidak merasakan hal tersebut meskipun persyaratan sudah diajukan menunjukkan nilai akuntabilitas tidak diterapkan; b) peran sebagai fasilitator, ditemukan nilai tanggungjawab yang tidak direalisasikan dimana pemeliharaan atas prasarana yaitu *barcode* tidak dilakukan dengan baik; dan c) peran sebagai motivator, terdapat nilai transparansi yang tidak dilakukan dengan baik yaitu tidak adanya *website* mengenai BPSKL promosi wisata dan kelembagaan BPSKL.

2. Komunikasi

Untuk komunikasi yang dilakukan oleh BPSKL dilakukan secara langsung dan tidak langsung. BPSKL memanfaatkan media sosial tanpa menghilangkan komunikasi melalui tatap muka ataupun

secara langsung. Komunikasi BPSKL bersama dengan masyarakat masih belum maksimal dilakukan menunjukkan pola komunikasi eksternal antara kantor (BPSKL) dengan masyarakat umum dilihat dari tidak adanya kerjasama BPSKL dengan masyarakat.

Pola tersebut mempengaruhi peran BPSKL yaitu 1) peran sebagai fasilitator, dibuktikan dengan tidak adanya pelatihan, pendidikan ataupun peningkatan ketrampilan untuk masyarakat; 2) peran sebagai stimulator, tidak adanya kerjasama BPSKL dengan masyarakat dan juga untuk lingkungan bisnis; dan 3) peran sebagai motivasi, pemilihan masyarakat untuk mengikuti sosialisasi oleh BPSKL.

Kesimpulan

1. Peran Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang (BPSKL) dalam Pengembangan Objek Wisata di Kota Lama Semarang belum dilakukan dengan baik atau maksimal. Berikut adalah uraian mengenai peran BPSKL dalam Pengembangan Objek Wisata di Kota Lama Semarang:

a. Peran yang dilakukan dengan baik yaitu peran sebagai koordinator. Kriteria menetapkan kebijakan dalam pariwisata dilakukan melalui ikut serta dalam penyusunan kebijakan untuk pengembangan wisata Kota Lama.

Kriteria sebagai pelaksana manajerial dilakukan dengan melaksanakan proses manajerial dalam pengembangan objek wisata di Kota Lama yaitu pengoordinasian, monitoring, pengarahan, evaluasi dan pengorganisasian.

b. Peran yang belum baik adalah

1) Peran sebagai fasilitator dibuktikan dengan kriteria pertama, menyediakan sarana dan prasarana yaitu terdapat perencanaan dan sebaran kebutuhan, rekomendasi kebutuhan dan pemeliharaan tetapi masih ada prasarana yang rusak dan belum diperbaiki oleh BPSKL. Kedua, memfasilitasi aktivitas masyarakat yaitu dengan tidak adanya pelatihan, pendidikan dan juga program untuk peningkatan ketrampilan masyarakat karena ketiadaan anggaran.

2) Peran sebagai stimulator dengan kriteria pertama, bekerjasama dengan berbagai sektor, yaitu dibuktikan dengan terdapat kerjasama tanpa MoU dengan dinas pemerintah dan belum ada kerjasama dengan masyarakat ataupun pebisnis. Kedua, bantuan dana yaitu tidak mengelola dana secara mandiri tetapi dapat mengajukan dana untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dan realisasi diskon PBB 50% yang tidak sesuai terhadap masyarakat.

3) Peran sebagai motivator dengan kriteria pertama, melakukan sosialisasi sesuai kebutuhan masyarakat tetapi, pemilihan masyarakat untuk sosialisasi tidak tepat sehingga informasi sosialisasi tidak tersampaikan dengan baik. Kedua, melakukan promosi wisata dibuktikan dengan tidak ada *website* BPSKL dan promosi dilakukan oleh dinas pariwisata, tetapi ada tindakan lain untuk promosi wisata museum dan media cetak.

2. Faktor Pendukung dan penghambat peran BPSKL dalam Pengembangan Objek Wisata di Kota Lama Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Faktor pendukung yaitu 1) kebijakan, ditandai dengan BPSKL melaksanakan perannya sesuai Perwal Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024. 2) Kepercayaan, adanya kepercayaan berbagai sektor terhadap BPSKL dalam mengembangkan objek wisata di Kota Lama. Kedua faktor ini mendukung peran sebagai coordinator.
- b. Faktor penghambat yaitu 1) Nilai yang tidak direalisasikan dengan baik yaitu tanggungjawab terhadap adanya kebijakan diskon PBB 50% kepada masyarakat dan transparansi mengenai tidak adanya *website* dan kejelasan keberadaan kantor untuk pelayanan BPSKL. 2) Komunikasi

yaitu kurangnya komunikasi kepada masyarakat ataupun pemilik bangunan di Kota Lama Semarang. Kedua faktor penghambat tersebut menghambat peran sebagai fasilitator, motivator dan stimulator.

Saran

Terdapat saran yang diberikan sebagai masukan mengenai Peran Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang dalam pengembangan objek wisata di Kota Lama Semarang adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya jalinan komunikasi dengan masyarakat ataupun pemilik usaha di Kota Lama Semarang dapat dilakukan dengan pengadaan dan pengelolaan forum atau organisasi untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam mengembangkan Kota Lama Semarang.
2. Mengadakan *website* khusus untuk BPSKL yang berisi informasi mengenai kelembagaan maupun kinerja dari BPSKL agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai BPSKL. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membuat laman *website* oleh teknisi yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Membangun hubungan kerjasama yang intens dengan masyarakat ataupun

pemilik bangunan agar partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata meningkat. Langkah yang dapat dilakukan adalah mengikutsertakan masyarakat dan pemilik bangunan dalam acara karnaval atau *event* tahunan di Kota Lama.

Daftar Pustaka

- Adlini, Miza., dkk. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Desmayeti, Junriana & Aprita, D. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Padang Melang di Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji*, 3(1), 645-653.
- Djaafar, L., Mozin, N. (2022). The role of the government in the management of tourism object development of Kurenai Beach Botubarani Village, Kabila Bone Bone Bolango Regency. *International Journal on Social Science, Economics and Art*. 12 (2), 53-59.
- Firdausyah, A. G., Dewi, S. P. (2020) Pengaruh Revitalisasi Terhadap Pola Ruang Kota Lama Semarang. *Jurnal Riptek*, 15(1), 17-27.
- Hasim, D. (2020). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Objek Wisata Yendi Beach pada Kampung Yendidori Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor. *Sosio E-Kons*, 12(02), 138.
- <https://doi.org/10.30998/sosioekon.s.v12i02.5124>
- Hidayat, E. S., Djadjuli, R. D. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 7(2), 277-293.
- Idris, M. T., Ati, N.U., & Abidin, A.Z. (2019). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Wisata Kampung Jodipan dan Kampung Tridi (Studi kasus di Kelurahan Jodipan dan Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*, 13(4), 68-77.
- Isnawati, S., Zulkarnaini. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 92-103.
- Keban, Y.T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu) Edisi Ketiga. Yogyakarta: Gava Media
- Mulyana, Fanggi, D. C. (2022). Peran Dinas Pariwisata dan Ekonomi dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Lasiana di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*. 4(1), 37-53.
- Nugraha, S. B., Suharini, E., Mukhlas, A. B., dkk. (2021) Pengaruh Penataan Kawasan Kota Lama Semarang pada Aspek Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Geografi*, 18(1), 21-29.
- Nurjanah. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Bokori Kabupaten Konawe. *Jurnal*

Penelitian Pendidikan Geografi.
4(1), 177-189.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 80
Tahun 2016 tentang *Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Semarang.*

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2
Tahun 2020 tentang *Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan Situs
Kota Lama.*

Putri, S. M. (2021). *Kehidupan Sosial
Ekonomi Kawasan Kota Lama
Semarang Tahun 2003-2018.*
AVATARA, 10(3).

Sholihah, M., Saadatirrohmi, S.A. (2022).
*The Role of Village Government in
the Development of Tourism
Villages in Tempos Village West
Lombok Regency Indonesia.*
Jurnal Pariwisata Nusantara, 1(3),
256-263.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian
Kualitatif R&B.* Bandung:
Alfabeta

Susi Iswanti, P. (2022). *Peran Pemerintah
Desa dalam Pengembangan Objek
Wisata.* *Publika : JJAP*, 8(1).
[https://doi.org/10.25299/jiap.2022.
vol8\(1\).9307](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9307)

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisata